

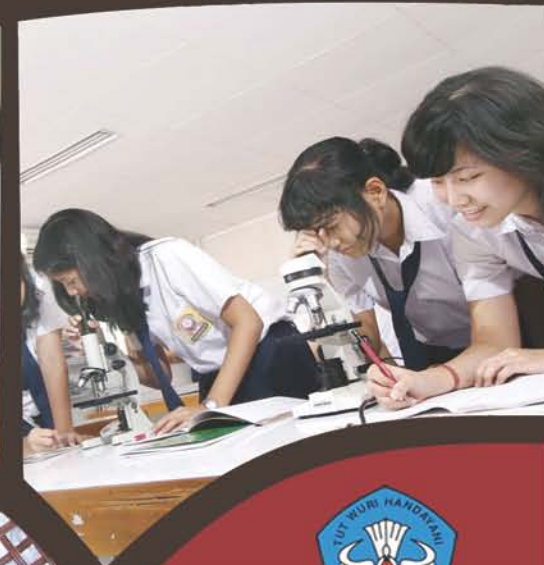
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN 2011

Hasil Pembahasan

Komisi 2 : Pendidikan Dasar

Disampaikan pada rembugnas 14-17 Maret 2010

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
Maret 2011



Agenda Rembug Nasional 2011

“meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 5 K Kemdiknas”



terselenggaranya LAYANAN PRIMA
pendidikan nasional untuk membentuk
insan Indonesia cerdas komprehensif

Sub-tema Pendidikan Dasar

Menjamin Kepastian Memperoleh
Layanan **Pendidikan Dasar** Bermutu
dan Berkesetaraan Secara Efisien dan
Efektif

Isu kebijakan

1. Pendanaan pendidikan dasar belum mencukupi sehingga memerlukan fine-tuning kegiatan di samping penambahan dana
2. Data sebagai dasar perencanaan tidak akurat dan berbagai versi
3. Peraturan perundangan-undangan kurang fleksibel pada derajat tersebut menghambat distribusi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Sistem evaluasi belum dapat mengungkapkan kondisi mutu pendidikan tingkat sekolah secara obyektif.
5. Satuan pendidikan dasar belum efektif memberikan layanan kepada anak berketenagaan

STRATEGI UMUM

Identifikasi Strategi Untuk Mencapai Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Yang Tinggi Pada Setiap Topik Bahasan

Strategi Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Berbagi Sumberdaya

- Berbagi Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Satuan Pendidikan dan Lembaga
- Berbagi PTK
- Berbagi Materi Pembelajaran

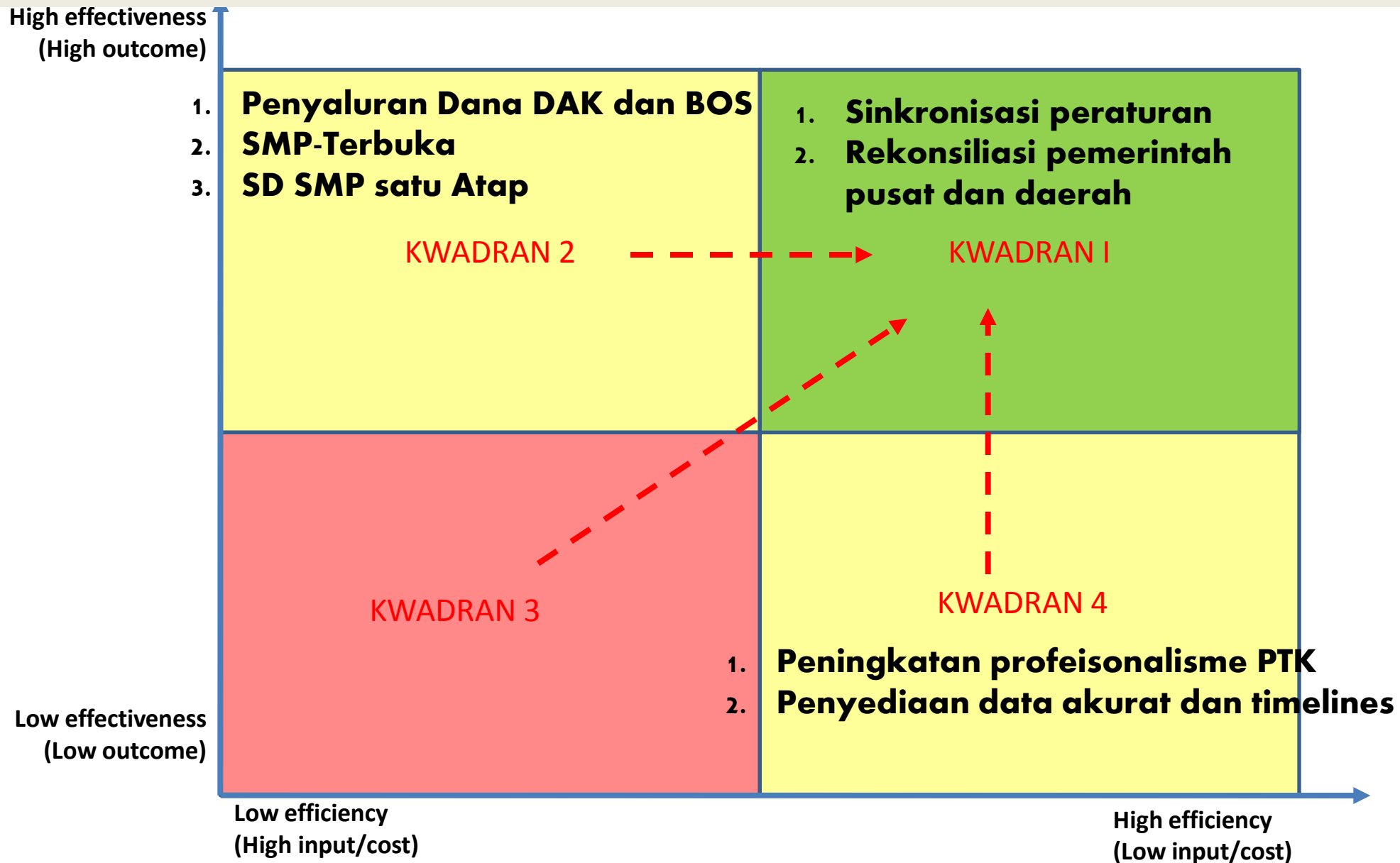
Integrasi Proses

- Integrasi pengumpulan data
- Integrasi Kegiatan Sosialisasi Program
- Integrasi mutasi-sertifikasi-peningkatan kualifikasi PTK.
- Integrasi perizinan-akreditasi-pemberian hibah Satuan Pendidikan.
- Integrasi pendaftaran Sekolah/PTN.
- Integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran
- Integrasi penyusunan bahan ajar

Sentuhan TIK

- Pemanfaatan E-Pembelajaran (mulai dari Kurikulum s/d UN)
- Pemanfaatan E-Layanan (Perizinan, Akreditasi, ...)
- Pemanfaatan E-Administrasi (Perencanaan, BMN,...)

Perbaikan Efisiensi dan Efektivitas Layanan



A.1. Penjaminan ketersediaan layanan pendidikan dasar yang terjangkau: SD-SMP Satu Atap

No	Strategi Umum	Strategi Pelaksanaan	Implementasi
1.	Berbagi pemanfaatan Fasilitas di SD dan SMP	<ul style="list-style-type: none"> •Identifikasi sekolah dasar yang dapat dimanfaatkan menjadi SD-SMP Satu Atap •Menyelenggarakan SD-SMP satu atap di SD 	Pengembangan satu gedung sekolah untuk dua jenis layanan pendidikan
2.	Berbagi PTK	Pemberdayaan guru-guru mata pelajaran tertentu untuk dua satuan pendidikan	Penggunaan dari satuan pendidikan yang sama untuk SD dan SMP pada mata pelajaran agama, penjas orkes, seni budaya, TIK
3.	Berbagi sumber belajar	Pengembangan Pusat Sumber Belajar terpadu	Penggunaan sumber dan fasilitas dalam satu gedung sekolah
4.	Penerapan TIK	Pengembangan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan pendataan menggunakan TIK dengan NUPTK, NISN, dan NPSN; 2. Pemanfaatan pengembangan sumber belajar berbasis TIK.
5.	Integrasi penggunaan sistem manajemen	Penerapan Manajemen Terpadu SD - SMP Satu Atap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu kepala sekolah mengelola SD dan SMP 2. Alokasi anggaran untuk menopang dua satuan pendidikan

A.2. Penjaminan ketersediaan layanan pendidikan dasar yang terjangkau: Paket A, Paket B, dan SMP-Terbuka

No	Strategi Umum	Strategi Pelaksanaan	Implementasi
1.	Berbagi Fasilitas Satuan Pendidikan	1. SD-Paket A 2. SMP-Paket B dan SMP Terbuka	Penggunaan satu sistem manajemen dan gedung sekolah untuk lebih dari satu jenis layanan pendidikan
2.	Berbagi PTK	Pemberdayaan guru-guru mata pelajaran tertentu untuk menangani lebih dari satu layanan pendidikan	Pemanfaatan guru dari sekolah formal untuk mengajar pada Paket A, Paket B dan guru pembina pada SMP Terbuka
3.	Penerapan TIK	Pengembangan media pembelajaran dan manajemen pendidikan berbasis TIK	1. Pemanfaatan pengembangan sumber belajar berbasis TIK. 2. Penerapan pendataan dengan NUPTK, NISN, NPSN, Ujian Nasional, Ujian sekolah, PPDB;

A.2. Penjaminan ketersediaan (lanjutan)

No	Strategi Umum	Strategi Pelaksanaan	Implementasi
4.	Berbagi sumber belajar	Pengembangan Pusat Sumber Belajar terpadu	Pemanfaatan sumber belajar pada sekolah , KKG , MGMP, KKKS, MKKS, KKPS dan MKPS untuk Paket A, Paket B dan SMP Terbuka

A.3. Penjaminan ketersediaan layanan pendidikan dasar yang terjangkau: Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

No	Strategi Umum	Strategi Pelaksanaan	Implementasi
1.	Berbagi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan layanan pendidikan inklusi2. Penyelenggaraan Sekolah Luar biasa terpadu	<ol style="list-style-type: none">1. Anak dengan ketunaan ringan (autis, low-vision, dislexya, CI-BI) dapat menggunakan prasarana pada satuan pendidikan dengan penambahan sarana sesuai dengan kebutuhan ketunaan.2. Pelayanan pendidikan SLB dari berbagai jenis ketunaan (netra, tuna ganda) dapat dilayani dalam satu satuan pendidikan dengan menggunakan prasarana dan sarana bersama,

A. 3. Penjaminan ketersediaan (lanjutan)

No	Strategi Umum	Strategi Pelaksanaan	Implementasi
2.	Berbagi pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan2. Pendampingan proses pembelajaran (shadow teacher)	<ol style="list-style-type: none">1. Guru mata pelajaran pada satuan pendidikan SLB dan Sekolah Inklusi dapat mengajar semua siswa dengan berbagai ketunaan, setelah mendapatkan pelatihan khusus, dan disertai guru pendamping.2. Kepala sekolah dapat bertindak sebagai manajer untuk satu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

A. 3. Penjaminan ketersediaan (lanjutan....)

No	Strategi Umum	Strategi Pelaksanaan	Implementasi
3.	Berbagi pemanfaatan sumber belajar	Pemanfaatan sumber belajar secara terprogram dan terjadwal	Pengembangan sumber belajar merujuk pada kurikulum yang sama, dengan modifikasi metode penyampaian dan alokasi waktunya tergantung pada kebutuhan peserta didik.
4.	Penggunaan TIK	Optimalisasi penggunaan TIK	<ol style="list-style-type: none">1. Penggunaan TIK bagi proses belajar tunanetra (komputer braille) dan tunarungu (komputer berbahasa isyarat), dan alat pendidikan khusus (bagi autis dan low-vision) dan kebutuhan ABK lain2. Penggunaan TIK untuk e-manajemen
5.	Pengintegrasian manajemen layanan pendidikan	Pengembangan manajemen terpadu	Uji coba manajemen terpadu untuk provinsi terpilih

A. 4. Penjaminan ketersediaan layanan pendidikan dasar yang terjangkau: Bantuan Operasional Sekolah

No	Strategi Umum	Strategi Pelaksanaan	Implementasi
1.	Berbagi tanggungjawab pendanaan pendidikan antara Pemerintah dan pemerintah daerah	Sinergi pendanaan antara Pemerintah dan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi pemanfaatan BOS secara tersistem, terpadu, dan berkelanjutan2. Realisasi pendanaan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran3. Pemerintah daerah mengalokasikan di APBD untuk menutup kekurangan BOS pusat untuk membiayai biaya operasional pendidikan di daerah masing-masing4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS secara terpadu
2.	Nota kesepahaman antara Pemerintah dan pemerintah daerah	Penyusunan rencana aksi	<ol style="list-style-type: none">1. Penandatanganan nota kesepahaman2. Sosialisasi isi nota kesepahaman3. Bimbingan teknis bagi daerah yang memerlukan

A4. Penjaminan ketersediaan layanan pendidikan (lanjutan)

No	Strategi Umum	Strategi Pelaksanaan	Implementasi
3.	Pemanfaatan TIK	Pengembangan sistem pendataan yang terintegrasi berbasis TIK	<ol style="list-style-type: none">1. Pendataan jumlah peserta didik untuk setiap sekolah secara on line2. Pendataan jumlah sekolah di seluruh kabupaten/kota secara on line3. Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan secara on line4. Pendataan kegiatan komite sekolah dalam mendukung program BOS

B. Manajemen Pendataan

No	Strategi Umum	Strategi	Implementasi
1.	Berbagai prasarana	Sistem pendataan tingkat sekolah	Pada tingkat Kemdiknas, prasarana dan sistem yang tersedia pada PDSP dapat dimanfaatkan oleh unit utama di lingkungan kemendiknas
2.	Berbagi petugas pengumpul dan analisis data		<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pada kabupaten/ kota dapat digunakan untuk melakukan pendataan dari PAUD, Dikdas dan Dikmen;2. Staf pada PDSP dapat melaksanakan analisis data untuk PAUD, Dikdas dan Dikmen.

B. Manajemen Pendataan (lanjutan.....)

No	Strategi Umum	Strategi	Implementasi
3.	Integrasi sistem pendataan	Penyusunan instrumen dan metode	Satu instrumen dan sistem dapat direplikasi untuk jenjang pendidikan lainnya
4.	Pemanfaatan teknologi pendataan	Sinkronisasi jenis dan tingkat teknologi	Satu sistem teknologi dapat digunakan untuk sistem pendataan PAUD, Dikmen, dan Dikti dengan sistem internet atau komputer

C. Standardisasi Peningkatan Mutu: Program SPM, SSN, dan SBI; serta Program Penyediaan , Kesejahteraan dan Profesionalisme PTK Dikdas

No	Strategi Umum	Strategi	Implementasi
1,	Berbagi metode	Identifikasi model-model metode pelatihan	Pengembangan program pelatihan komprehensif untuk pengembangan satuan pendidikan dan PTK dikdas.
2.	Berbagi SDM	Peningkatan kompetensi pengawas	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan kompetensi pelatih untuk pengelolaan satuan pendidikan dan PTK Dikdas.2. Pengembangan pengawasan untuk memantau kinerja satuan pendidikan dan PTK dikdas

C. Standardisasi Peningkatan (lanjutan)

No	Strategi Umum	Strategi	Implementasi
4.	Integrasi sistem evaluasi		Evaluasi Diri Sekolah yang hasilnya untuk mendeteksi progres satuan pendidikan dan PTK dikdas
5.	Penerapam TI		Sistem pendataan dengan menggunakan satu format dan menggunakan NUPTK, NSS, NISS

FORMAT2: Efisiensi Kegiatan

No	Kegiatan Individu	Kegiatan Terintegrasi	Efisiensi/Efektivitas
1.	SD-SMP satu atap	SMP dan yang sederajat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghematan Biaya penyelenggaraan 2. Penghematan waktu pelayanan pengajaran 3. Peningkatan Mutu terintegrasi
2.	<input type="checkbox"/> Sekolah Inklusi <input type="checkbox"/> Sekolah Luar biasa	Pendidikan setara antar berbagai jenis ketunaan dan setara antara peserta normal dan berketunaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghematan biaya pengembangan sistem dan pengumpulan data 2. Efektif dalam pengukuran implementasi program pendidikan dasar secara komprehensif. 3. Efisien dalam penilaian hasil belajar peserta dengan berbagai ketunaan

FORMAT2 (lanjutan)

No	Kegiatan Individu	Kegiatan Terintegrasi	Efisiensi/Efektivitas
3.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Program BOS<input type="checkbox"/> Program DAK<input type="checkbox"/> Penyaluran Dana Kesejahteraan Guru	Pendanaan pendidikan dasar yang memadukan variabel prasarana, siswa dan pendidik	<ol style="list-style-type: none">1. Penghematan biaya pengembangan sistem dan pengumpulan data2. Efektif dalam pengukuran implementasi program pendidikan dasar secara komprehensif.3. Efisien penggunaan dana manajemen penyaluran dana

FORMAT2 (lanjutan)

No	Kegiatan Individu	Kegiatan Terintegrasi	Efisiensi/Efektivitas
4.	Sistem pendataan tingkat sekolah	Pendataan antar jenjang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghematan biaya pengembangan sistem dan pengumlan data 2. Efektif dalam menjamin akurasi data 3. Efisien dalam pengolahan data
5.	<input type="checkbox"/> Program SPM-SSN dan SBI <input type="checkbox"/> Program Penyediaan , Kesejahteraan dan Profesionalisme PTK Dikdas	Standardisasi peningkatan mutu pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghematan dalam pengembangan sistem evaluasi dan intervensi 2. Penghematan pelaksanaan sosialisasi 3. Efektivitas dalam progress-check

FORMAT 3

Penentuan Kegiatan Untuk Mencapai Strategi Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas

Kegiatan Terintegrasi	Tahun Pelaksanaan	PIC	
		Penanggung jawab	Pendukung
Penjaminan ketersediaan pelayanan pendidikan dasar yang terjangkau	2012	Dit. Pembinaan SD Dit. Pembinaan SMP Dit. Pembinaan PK-LK	Badan SDM Dit. Pemb. PTK Dikdas, Puskurbuk Dinas Pendidikan
Sistem Pendanaan Pendidikan Dasar yang terintegrasi	2012	Dit. Pemb SD Dit. Pemb SMP Dit Pemb PTK Dikdas	Badan SDM Dinas Pendidikan

FORM 3 (lanjutan)

Kegiatan Terintegrasi	Tahun Pelaksanaan	PIC	
		Penanggung jawab	Pendukung
Sistem pendataan tingkat sekolah	2012	Sekretariat Ditjen Dikdas	Direktorat di lingkungan Ditjen Dikdas PSDP
Standardisasi peningkatan mutu pendidikan dasar	2012	Dit. Pemb SD Dir. Pemb. SMP Dit. Pemb PTK Dikdas	Badan SDM Puslitjak